

## **KERJASAMA JEPANG-KENYA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGEDEPANKAN *HUMAN SECURITY***

**Aurelna Griseldis Setyarto**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

[aurelnagriseldis23@gmail.com](mailto:aurelnagriseldis23@gmail.com)

**Meilisa Jibrani**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

[151200090@student.upnyk.ac.id](mailto:151200090@student.upnyk.ac.id)

### **Abstrak**

Perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang yang dahulunya merupakan politik aneksasi menjadi pasifisme membuat Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional. Pemerintah Jepang pun mulai memfokuskan konsep keamanan manusia sebagai ide dari agenda kebijakan luar negerinya. Kebijakan ini diambil Jepang sebagai prinsip universalitas etis. *Human security* menjadi fokus arah kebijakan Jepang sebagai bentuk tanggung jawab Jepang pada sistem global. Implementasi kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep *human security* adalah dengan melakukan kerja sama dengan Kenya. Artikel ini menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama antara Jepang dan Kenya ini mampu memenuhi klasifikasi keamanan manusia. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *human security* dan teori kosmopolitanisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Jepang ke Kenya dalam bentuk ODA merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep *human security* dan dari sudut pandang kosmopolitanisme, ODA Jepang telah mampu melampaui batas kedaulatan

**Kata kunci: Jepang, Kenya, *Human Security*, Kosmopolitanisme**

### **Abstract**

*The change in the direction of Japan's foreign policy, which used to be a policy of annexation into pacifism, made Japan have a sincere aim for international peace. The Japanese government also began to focus on the concept of human security as Japan's foreign policy agenda. This policy was taken by Japan as the principle of ethical universality. Human security is the focus of Japan's policy direction as a form of Japan's responsibility to the global system. Implementation of Japan's policy that prioritizes the concept of human security is by establishing a cooperative relationship with Kenya. This article explains how this form of cooperation between Japan and Kenya is able to meet the classification of human security. The analysis was carried out using the concept of human security and cosmopolitanism theory. This research shows that Japan's foreign policy towards Kenya in the form of ODA is an implementation of Japanese foreign policy that puts forward the concept of human security and from the cosmopolitanism perspective, Japan's ODA has been able to transcending the limits of sovereignty.*

**Keywords: Japan, Kenya. Human Security, Cosmopolitanism**

### **PENDAHULUAN**

Kekalahan Jepang kepada pasukan sekutu usai peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merujuk pada era pendudukan Amerika di Jepang. Salah satu kebijakannya adalah dengan merekonstruksi Jepang dengan dibuatnya konstitusi baru. Dalam konstitusi Pasal 9 atau yang sering dikenal dengan klausul perdamaian, berisi tentang Jepang yang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak negara berdaulat dan menjauhi ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Konstitusi ini memberikan pengekangan kepada Jepang dalam upaya pembuatan kebijakan keamanan independennya. Jepang tidak bisa mempertahankan angkatan darat, laut dan udaranya (Potter, 2009).

Melihat dari sisi lain, muncul ancaman baru bagi dunia internasional dengan bergesernya bipolaritas menuju ke unipolaritas pada awal 1990-an. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan baru bagi negara-negara di dunia sebagai aktor dalam sistem internasional. Peningkatan penilaian dan respons terhadap ancaman baru ini mendorong para pembuat kebijakan dan elite negara untuk melihat peluang-peluang

ide baru untuk menjamin stabilitas internasional. Erat kaitannya dengan cita-cita Jepang yang tertuang dalam konstitusi Pasal 9 bahwa Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional, pemerintah Jepang pun mulai memfokuskan konsep keamanan manusia sebagai ide dari agenda kebijakan luar negerinya dan sebagai bentuk tanggung jawab Jepang pada sistem global.

Jepang pun berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan ide keamanan manusia di dunia internasional. Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama pada pidatonya di Sidang Umum Majelis Umum PBB, bulan September 1995 mulai memperkenalkan gagasan *human security*. Murayama menekankan bahwa kebijakan Jepang lebih berpusat pada fokus pada kemanusiaan dalam orientasi luar negerinya dan berkeinginan merangsang negara-negara maju lainnya untuk turut andil dalam fokus keamanan manusia internasional. Mengutip pula dari 1999 *Diplomatic Book of Japan*, Jepang secara eksplisit telah mengadopsi konsep keamanan manusia dalam skala yang penuh dan mulai memasukkan langkah-langkah spesifik dalam agenda kebijakan luar negeri dan keamanannya sejak tahun 1998. Pada tahun 2003 laporan keamanan manusia yang dilaporkan oleh *Commission on Human Security*, menggarisbawahi pendekatan komprehensif dari negara ke individu dan dengan jelas mendefinisikan istilah "*freedom of fear*" mengacu pada peristiwa-peristiwa kekerasan fisik juga konflik bersenjata dan "*freedom from want*" yang mengacu pada kemiskinan struktural negara-negara berkembang yang semakin terpuruk oleh globalisasi (Baba.2016).

Gagasan tentang keamanan manusia mulai berakar dan dituangkan melalui *Japan's Official Development Assistance (ODA)*. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mulai menggulirkan program ODA pada tahun 1950 dan Jepang pun turut bergabung dalam program ini. ODA Jepang pun berkembang pesat, yang kemudian didukung dengan Departemen Luar Negeri (MOFA) yang bertanggung jawab untuk bantuan hibah dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* yang

mengelola pelaksanaannya. JICA mendukung upaya mengatasi persoalan negara-negara berkembang dengan berbagai bentuk pendekatan bantuan dengan menggabungkan pendekatan berbasis regional, negara, maupun orientasi terhadap pembangunan. JICA bertanggung jawab untuk mengelola seluruh bentuk ODA, baik kerja sama teknis, pinjaman Yen, juga bantuan hibah.

Kenya sendiri merupakan negara yang telah merdeka pada tahun 1963. Hubungan Jepang dan Kenya dimulai bahkan sebelum Kenya berdaulat. Setelah Kenya merdeka, hubungan kedua negara ini meluas dan menjadi lebih intim. Namun, Kenya memiliki banyak ancaman pada keamanan manusia masyarakatnya. Kasus serius yang dialami Kenya, meliputi kerawanan ekonomi, kerawanan pangan, kerawanan lingkungan, kerawanan kesehatan, kerawanan politik, dan lainnya. Pada tahun 1993, bahkan telah dibentuk *Tokyo International Conference on African Development* (TICAD) dengan tujuan membantu pembangunan Afrika. Hubungan diplomatik kedua negara ini pun dapat dikatakan istimewa, Nairobi adalah kantor pusat JICA, *Japan External Trade Organization* (JETRO) dan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) (*Embassy of Rep Kenya in Japan*). Kenya pun merupakan penerima ODA Jepang terbesar di Afrika yang berupa bantuan hibah, bantuan pinjaman dan kerja sama teknis dalam sektor prioritas, yakni antara lain sumber daya manusia, pertanian, infrastruktur ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan.

## **KERANGKA BERPIKIR**

Untuk menganalisis kebijakan Jepang dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Kenya, penulis menggunakan konsep *human security* untuk menganalisis apa yang ingin dibawa oleh ODA Jepang ke Kenya. Selain itu, penulis juga menggunakan teori kosmopolitanisme untuk menjelaskan tentang mengapa Jepang dapat

mengimplementasikan kebijakan berupa bantuan luar negeri ODA kepada negara kurang berkembang seperti Kenya.

*Human security* merupakan konsep yang dewasa ini digunakan sebagai reaksi atas masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia internasional, diantaranya kekerasan, kemiskinan, *human trafficking*, dan pelanggaran HAM. Definisi dari konsep *human security* sendiri menurut *Commission on Human Security (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)* adalah melindungi segala kebebasan fundamental manusia yang merupakan esensinya dalam bertahan hidup. Konsep ini juga melindungi manusia dari ancaman yang sifatnya kritis dan meluas.

Konsep ini sendiri merombak lagi konsep-konsep HI tradisional yang cenderung *state-centric*. Sifat dari konsep ini sendiri adalah membuang jauh-jauh konsep keamanan tradisional yang hanya fokus kepada ancaman dengan aktor utama negara atau *high politics* seperti agresi militer dan peperangan. Gagasan yang ingin dibawa oleh *human security* adalah bersifat *people-centric* yaitu lebih menekankan keamanan secara individual.

Adapun CHS menjabarkan beberapa jenis ancaman keamanan yang mungkin hadir dalam Human Security:

**Table 1. Data jenis keamanan dan ancaman yang mungkin dari UNDP Human Development Report 1994 dan HSUOCHA**

<b>Jenis Keamanan</b>	<b>Bentuk Ancaman yang Mungkin</b>
Keamanan ekonomi	kemiskinan, pengangguran
Keamanan pangan	kelaparan
Keamanan kesehatan	malnutrisi, penyakit menular, kekurangan akses terhadap fasilitas kesehatan
Keamanan lingkungan	degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya, bencana alam, polusi
Keamanan pribadi	kekerasan fisik, terorisme, kriminalitas
Keamanan komunitas	ketegangan antar etnis, agama, dan identitas lainnya
Keamanan politik	penindasan politik, pelanggaran HAM

Pada bagian selanjutnya, penulis menggunakan teori kosmopolitanisme untuk melihat ODA Jepang dalam dimensi kemanusiaannya. Teori ini dicetuskan oleh Andrew Linklater yang terinspirasi dari filsuf Yunani Kuno Diogenes (412-323 SM). Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena internasional namun dengan dasar etika dan norma, sehingga gagasannya masuk ke dalam teori normatif HI.

Kosmopolitanisme menentang gagasan teori HI tradisional yang terlalu meletakkan kepentingan negara atau manusia sebagai dasar atas suatu tindakan aktor. Menurut Linklater, teori di atas hanya dapat mewujudkan tatanan global yang mendukung setiap negara dalam mengejar *national interest-nya*. Namun, sebenarnya yang dibutuhkan dalam HI adalah teori-teori yang peka terhadap isu internasional dan berbasis etika (Baba, 2016). Menurut juga, dunia internasional justru terikat oleh tanggung jawab global yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan dan perdamaian (Rosyidin, 2020).

Argumen pertama dari teori kosmopolitanisme yang dijadikan indikator analisis oleh penulis adalah gagasan mengenai universalisme etis. Gagasan tersebut menyampaikan bahwa etika dan norma bersifat universal dan tidak bergantung pada batas-batas negara. Dengan demikian, kewajiban moral dan politik negara melampaui sekat-sekat kedaulatannya. Kewajiban tersebut bukan didasari atas kepentingan apapun, namun semata-mata karena prinsip etis. Dengan demikian, gagasan ini menganggap negara bukanlah substansi yang bersifat individualis.

Argumen kedua yang disampaikan oleh Andrew Linklater adalah tentang definisi ulang atas individu. Dalam kosmopolitanisme, individu menempati posisi yang sangat penting dalam hubungan internasional. Individu merupakan tujuan tertinggi dalam hubungan internasional. Hal ini juga sejalan dengan konsep human security yang bersifat *people-centric*. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan hak untuk diperlakukan setara, tidak bergantung dari status artifisial seperti kewarganegaraan. Jika diimplementasikan dalam kasus ini, setiap individu di Kenya berhak mendapat keamanan baik pangan, ekonomi, maupun personal sama dengan warga negara lain di dunia. Dapat

ditarik kesimpulan pula lewat argumen ini bahwa ketika seseorang menjadi warga negara Jepang, bukan berarti warga tersebut menutup mata pada masalah kemanusiaan di negara lain termasuk Kenya.

Argumen ketiga yang disampaikan dalam Kosmopolitanisme adalah tentang bagaimana gagasan ini dibagi menjadi dua aliran, yaitu *thin cosmopolitanism* dan *thick cosmopolitanism*. Komitmen yang dijalankan untuk merangkul dan menaruh kepedulian besar terhadap korban atau pihak yang dirugikan disebut *thin cosmopolitanism*. Dengan demikian, komitmen dalam *thin cosmopolitanism* hanya sebatas bantuan terhadap korban yang merugi, namun belum berusaha menghilangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi. Sementara itu, lebih jauh lagi, jika intervensi dan komitmen yang dijalankan oleh para aktor sampai pada titik untuk mengubah struktur atau menghilangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan kerugian, maka hal ini telah masuk dalam ranah *thick cosmopolitanism*. Gagasan universalisme etis ini digunakan penulis untuk melihat bagaimana Jepang sebagai negara besar berkeinginan untuk memberikan bantuan bagi perkembangan negara lain yang kurang berkembang, dalam kasus ini yaitu Kenya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam jurnal artikel ini, metode yang digunakan tim penulis dalam melakukan analisis penelitian adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai media analisis adalah dengan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal daring, skripsi atau tesis, serta artikel daring. Data yang diperoleh membantu tim penulis menganalisis bentuk kerja sama antara Jepang dan Kenya ini mampu memenuhi klasifikasi keamanan manusia. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dalam analisis yang telah dilakukan tim penulis. Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kerja sama

Jepang dan Kenya dengan orientasi konsep human security dilengkapi dengan pandangan kosmopolitanisme.

## **PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah *human security* di Kenya merupakan poin yang serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Jepang dengan arah kebijakan luar negerinya yang baru dengan fokusnya pada *human security* sebagai negara yang pasifis mulai mengarahkan hubungan diplomatik lebih mendalam dengan Kenya. Hubungan kedua negara ini pun telah berjalan selama lebih dari lima dekade, dan Kenya menduduki posisi yang penting dalam diplomasi strategis dan melancarkan cita-cita Jepang untuk mencapai perdamaian dunia. Kenya pun menjadi negara penerima ODA terbesar di Afrika dengan dijadikannya Kenya sebagai rumah dari banyak kantor pusat penyaluran bantuan dari Jepang.

Terlepas dari Kenya yang merupakan negara paling maju di Afrika Timur dan Afrika Tengah, Kenya masih menghadapi masalah yang sangat serius di Sub-Sahara Afrika seperti perluasan di segmen penduduk termiskin karena terjadi urbanisasi yang sangat cepat, memburuknya pengangguran terutama di kalangan anak muda, dan bencana alam yang sering terjadi di Kenya dimana 80% tanahnya merupakan tanah yang gersang. Kenya dijadikan sebagai panutan kerja sama Jepang di Afrika, dan menjadi pijakan efektif Jepang mengimplementasikan kebijakan luar negerinya yang fokus pada konsep *human security* di kawasan Afrika Timur dan Afrika Tengah.

### **ODA Jepang di Kenya dalam Konsep Human Security**

Jepang pertama kali membuka kedutaan besarnya di Kenya pada tahun 1964, disusul dengan Kenya yang membuka kedutaan besarnya di Jepang pada tahun 1967. Dari hubungan yang baik ini, Kenya menjadi pintu gerbang utama dari hubungan diplomatik Jepang dengan Afrika Timur dan Afrika Tengah. Kenya sendiri masih memiliki masalah human security yang cukup krusial. Kasus serius yang dialami Kenya, meliputi kerawanan ekonomi, kerawanan pangan, kerawanan lingkungan, kerawanan kesehatan,



juga kerawanan politik. Kerawanan ekonomi yang dialami Kenya secara garis besar disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di Kenya, sebagian besar warga memiliki sikap negatif terhadap pendidikan dan lebih memilih untuk berkecimpung dalam bidang pastoral daripada mengenyam pendidikan formal. Dari kerawanan ekonomi ini, sangat mempengaruhi berbagai bidang lain dalam jalannya kehidupan di Kenya.

Kerawanan ekonomi yang dialami Kenya menyebabkan kerawanan pangan yang cukup serius. Kerawanan pangan ini terjadi karena panen yang buruk dan kurangnya pendapatan karena tingkat pengangguran yang tinggi. Mengacu pada studi yang dilakukan, sebagian masyarakat Kenya tidur dalam keadaan lapar, makan makanan yang tidak disukai, makan kurang dari 3 kali dalam sehari, makan makanan yang tidak bervariasi, keracunan makanan, dan banyak akibat lain. Petani di Kenya pun mengalami banyak kendala panen dikarenakan kekeringan, kondisi iklim yang tidak menentu, juga pupuk dan benih yang kualitasnya buruk. Kerawanan kesehatan di Kenya secara garis besar disebabkan oleh malaria, HIV/AIDS, kanker, tuberkulosis, dan penyakit lain yang sulit dicegah dan diatasi dikarenakan kekurangan obat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kenya. Polusi udara dan deforestasi yang terjadi di Kenya pun makin memperburuk keamanan hidup masyarakatnya. Korupsi, sistem pemerintahan yang buruk, pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan merupakan ancaman paling umum terhadap keamanan politik di Kenya (Kumssa, 2016).

Jepang dan Kenya memiliki hubungan yang erat, meskipun kedua negara sempat mengalami hubungan yang fluktuatif. ODA Jepang sempat terhambat akibat pergolakan politik di Kenya pada tahun 1991 hingga 1992. Menurut laporan ODA tahun 1993, muncul kritik internasional mengenai peningkatan kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan penundaan reformasi ekonomi di Kenya. Salah satu prinsip ODA Jepang adalah untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Prinsip tersebut berimplikasi terhadap keberlangsungan pemberian ODA. Jepang kemudian menangguk pemberian bantuan ke Kenya tahun 1991 karena Kenya tidak menyelaraskan ketetapan

*ODA Charter* 1992 (atau *Four New-Aid Guidelines* 1991 sebelum terbentuk *ODA Charter*) ketika terjadi kerusuhan, perang sipil, dan pelanggaran HAM. Di tahun 1993, Jepang kemudian mencabut penggunaan sanksi tersebut dan melanjutkan bantuan ketika pemerintah Kenya berupaya untuk mengakomodasi komunitas internasional dan memperbaiki situasi politiknya. Sejak saat itu, Kenya menjadi penerima ODA terbesar Jepang di Afrika.

Dari tahun 1993 hingga 1995, Jepang merupakan pendonor terbesar di Kenya. Bantuan hibah di Kenya meningkat dari US\$ 57 juta di tahun 1993 menjadi US\$ 93 juta di tahun 1995. Menurut data Kementerian Luar Negeri Jepang tahun 2014, Kenya masih berada di posisi teratas sebagai negara penerima di Sub-Sahara Afrika dan nomor sembilan di dunia dalam kategori ODA bilateral (Hanavia, 2019). Bantuan Jepang ke Kenya difokuskan pada bantuan teknis, bantuan hibah dan pinjaman lunak. Bidang prioritas bantuan bilateral ini, yaitu: infrastruktur ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Pendistribusian ODA untuk berbagai sektor yang berbeda ini sekaligus mencerminkan pentingnya sektor tertentu bagi Jepang dalam memberikan bantuan luar negerinya.

Sektor yang menjadi fokus bantuan Jepang ke Kenya adalah pengembangan sumber daya manusia, pertanian, ekonomi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Adapun bentuk ODA Jepang ke Kenya yaitu dalam tiga bentuk: bantuan hibah, bantuan pinjaman, dan kerja sama teknis.

Bantuan pinjaman yang diberikan Jepang didistribusikan ke beberapa aktor penggerak ekonomi Kenya yaitu pemerintah dan badan usaha milik negara. Berikut data spesifik tentang besaran bantuan dan sektor yang diakomodasi dalam bantuan Jepang ke Kenya:

**Table 2. Pinjaman Jepang ke Pemerintah Kenya 1989-2018, The National Treasury Kenya**

No.	Date Signed	Title	Commitment in ¥	Commitment in US\$ Equivalent
1	1989	Engineering services Sondu/Miriu Hydropower Project	668	6.0
2	1990	Mombasa Airport Improvement Project	9.010	82.0
3	1990	Tana Basin Development Road Project II	6.523	59.4
4	1991	Financial Sector Adjustment Project	6.942	63.2
5	1993	Export Development Loan	8.242	75.0
6	1993	Mwea Irrigation Project	572	5.2
7	1993	Horticultural Handling Project	2.016	18.4
8	2010	Mwea Irrigation Project ph. 2	13.178	120.0
9	2010	Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Line Construction Project	12.410	113.0
10	2012	Mombasa Port Area Project	27.691	252.0
11	2015	Health Sector Policy for Attainment of The Universal	4.000	36.0
12	2016	Olkaria V Geothermal Power Development Project	45.690	416.0
13	2017	Mombasa Port Area Development Project II	12.446	113.0
14	2018	Olkaria 1 Units 1,2 and 3 Geothermal Power Plant Rehabilitation Project	10.077	92.0
<b>TOTAL</b>			<b>159.465</b>	<b>1.451,2</b>

Dalam tabel tersebut, dapat terlihat bahwa hingga tahun 2018, total pinjaman yang diberikan Jepang mencapai 1.451,2 juta US Dollar. Jepang tidak hanya memfokuskan bentuk pinjaman kepada sektor ekonomi saja, namun lebih bervariasi. Bantuan tersebut telah merepresentasikan beberapa aspek dalam *human security*.

Sebagai contoh dalam tabel tersebut terdapat bantuan untuk *Mwea Irrigation Project* tahun 1993 dan 2010. Project ini intinya adalah perluasan area irigasi pertanian sehingga produktivitas hasil pertanian pun meningkat. Area irigasi ini awalnya hanya 65

*acre* namun saat ini dapat berkembang hingga 30.050 *acre*, dengan 22.000 *acre* diantaranya digunakan untuk produksi padi, sementara sisanya digunakan untuk budidaya tanaman subsistem (*National Irrigation Authority*). Bentuk dukungan Jepang terhadap ketahanan pangan Kenya pun terlihat dari pinjaman yang disalurkan untuk pembelian beras saat Kenya mengalami krisis pangan, juga pembangunan gudang gandum. Lewat pemaparan dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Jepang untuk memberikan pinjaman ke Kenya telah memenuhi salah satu aspek human security yaitu *food security*. Pada TICAD ke-8 yang dilaksanakan pada 27-28 Agustus 2022 di Tunisia, pembahasan pun difokuskan pada ketahanan pangan Afrika yang mengajukan pertanian sebagai industri utama.

Contoh lainnya adalah bantuan di bidang kesehatan berupa pembuatan kebijakan kesehatan di Kenya pada tahun 2015. Bantuan ini juga berupa pinjaman untuk fasilitas kesehatan. Kemudian, Jepang juga menyediakan air minum bersih yang aman bagi masyarakat Kenya seperti pasokan air Nukuru dan pasokan air Nairobi. Lewat bantuan-bantuan ini, Jepang berhasil mengimplementasikan aspek *health security*. *Japan Center for International Exchange* (JCIE) pada tanggal 6-14 Juni 2015 pun turut mengimplementasikan aspek *health security* dengan menyelenggarakan tur pers yang melibatkan delegasi jurnalis dari Jepang ke Kenya untuk mengkaji pembangunan Kenya melalui lensa sistem kesehatan negara. Melalui *Global Health and Human Security Program* yang diselenggarakan JCIE di Kenya ini, dilakukan banyak kegiatan seperti pengamatan fasilitas kesehatan perkotaan baik milik publik atau swasta, memberikan inisiatif program akar rumput pedesaan, juga menghadirkan relawan kesehatan (JCIE, 2015)

Dalam upaya mendukung ketahanan ekonomi Kenya, pinjaman diberikan untuk membangun proyek pembangkit listrik dan mendukung pembangunan jalur transmisi listrik yang meningkatkan distribusi listrik di Kenya yang secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi Kenya. Selanjutnya ada juga Mombasa *Airport Project* di tahun 1990 dan tahun 2017. Program ini dimaksudkan untuk membangun bandara Mombasa dari segi fasilitas dan manajemennya. Gagasan yang ingin dibawa atas perbaikan ini

adalah agar bandara tersebut mampu menjadi penghubung utama antara Kenya dan negara-negara Eropa, dimana mayoritas turis asing berasal (JICA Japan). Jika penerbangan dari Eropa dapat secara langsung dilakukan melalui bandara ini, diharapkan semakin banyak turis yang berkunjung ke Kenya dan meningkatkan devisa negara.

Melalui lewat kebijakan bantuan pinjaman ini, Jepang telah merepresentasikan aspek *economy security*. Penguatan ketahanan ekonomi di Kenya pun ditingkatkan terus menerus oleh Jepang. Pada tanggal 16 Juni 2022, JICA telah menandatangani perjanjian hibah dengan Pemerintah Republik Kenya di Mombasa, untuk memberikan hibah hingga 6.000 juta yen untuk "*Project for Infrastructure Development in Mombasa Economic Zone*" di area Dongo Kundu. Proyek ini dilakukan untuk pembangunan fasilitas pasokan air dan pembangunan saluran drainase air hujan, serta pengembangan lahan. Melalui proyek ini pula, diharapkan dapat meningkatkan investasi swasta dan dapat mempromosikan logistik Kenya maupun Afrika (JICA, 2022).

Jepang pun menawarkan pula dukungan pengelolaan lingkungan sebagai implementasi dari *environmental security*. Program yang diberlakukan adalah pembangunan perlindungan desa-desa di Kenya dari bencana banjir. Bantuan pinjaman yang diterima Kenya juga digunakan untuk mendukung energi terbarukan yang disalurkan pada Kenya *Electricity Generation Company* (KEN GEN) untuk pembangunan jalur transmisi Olkaria-Lessos-Kisumu. Upaya mempromosikan pengembangan panas bumi sebagai sumber energi bersih dan terjangkau dan menstabilkan pasokan energi Kenya, dan penjelasan mendalam tentang ilmu energi panas bumi dan manufaktur berkualitas tinggi yang dilakukan oleh Jepang juga merupakan salah satu upaya dari implementasi keamanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Kivisi, 2019).

Dalam memajukan agenda iklim di Kenya, Jepang turut memberikan kontribusinya melalui pendanaan iklim sekitar 2,68 juta USD kepada *United Nations Development Programme* (UNDP). Pendanaan ini bertujuan untuk membantu berjalannya proyek "*Forestry and Land Restoration Action for Kenya's NDC*". Inisiatif ini pun didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kenya (UNDP, 2022).

## **ODA Jepang-Kenya dalam Analisis Kosmopolitanisme**

Menurut pandangan kosmopolitan, bantuan ODA Jepang ke Kenya merupakan bagian dari implementasi universalisme etis. ODA merupakan representasi tanggung jawab global yang dipikul Jepang sebagai negara yang memiliki substansi bersifat non individualis. Perilaku Jepang tersebut juga masuk ke dalam gagasan dimana norma kemanusiaan bersifat cross border dan melampaui batas-batas kedaulatan. Jepang membuktikan bahwa bantuan pembangunan mampu dilakukan antar negara tanpa memandang identitas buatan seperti status kewarganegaraan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya negara yang mendapat bantuan ODA Jepang.

Jepang sebagai negara yang tidak bersifat individualis dan menjunjung tinggi perdamaian dunia juga tertuang pada pasal 9 Konstitusi Jepang yang berbunyi,

*"Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes."*

*"In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized."*

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa Jepang telah mendeklarasikan untuk menghentikan perang dan menjunjung tinggi perdamaian internasional berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, tanggung jawab yang dijalankan oleh Jepang bukan hanya tentang ditiadakannya gerakan militer yang agresif, namun juga tentang Jepang yang turut andil dalam pembangunan dunia (Nautilus Institute), salah satunya di Kenya. Pendefinisian istilah *"freedom of fear"* mengacu pada peristiwa-peristiwa kekerasan fisik juga konflik bersenjata dan *"freedom from want"* yang mengacu pada kemiskinan struktural negara-negara berkembang yang semakin terpuruk oleh globalisasi oleh *Commission of Human Security* juga dapat dianalisis sebagai bentuk dimana Jepang berusaha mengimplementasikan gagasan universalitas etis.

Implementasi gagasan universalitas etis ini pun didorong dengan kepercayaan tradisional Jepang yang menyangkut kemanusiaan yang telah menjadi jati diri dari masyarakat Jepang, yakni nilai Bushido. Nilai Bushido yang diciptakan oleh para Samurai Jepang pada pemerintahan Shogun ini masih menjadi bagian penting dalam kepribadian masyarakat Jepang. Prinsip Bushido ini menekankan pada loyalitas dan hubungan antara sesama manusia adalah hal yang terpenting. Sikap dan kepercayaan domestik ini telah memberikan pengaruh dan membuka jalan kosmopolitan dalam pembuatan keputusan kebijakan bantuan Jepang.

Pada dasarnya ODA diberikan langsung oleh para negara pendonor ke negara-negara berkembang dengan prinsip untuk mengusahakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan dari daerah dan negara yang terbelakang di dunia. Dengan latar belakang hubungan diplomatik yang baik dengan Afrika dan ekonomi Jepang yang berkembang pesat juga stabil, Jepang turut memberikan bantuan kepada Afrika, salah satunya Kenya.

Solidaritas global yang ingin dibangun oleh Jepang juga terlihat dalam hubungan diplomatik Jepang dan Afrika yang pada akhirnya melahirkan sebuah kerjasama bilateral *Tokyo International Conference On African Development* (TICAD). Forum kerjasama Jepang dan Kenya ini berdiri sejak tahun 1993. TICAD awalnya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan, perdamaian, dan keamanan Afrika melalui penguatan hubungan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan multilateral.

Berakhirnya perang dingin memberi dampak yang nyata bagi Afrika, negara-negara di dunia mulai memandang Afrika sebagai negara yang tidak begitu bermakna bagi peta geopolitik dunia. TICAD pun bertujuan untuk memfokuskan kembali perhatian internasional pada kebutuhan pembangunan Afrika. Forum kerjasama Jepang dan Afrika ini juga hadir sebagai alat dan wadah komunikasi dan promosi kebijakan tingkat tinggi antara pemimpin Afrika dan mitra pembangunan Afrika mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan, keamanan manusia, perdamaian dan stabilitas juga pemerintahan (Fathirrahma, 2018). Memastikan keamanan manusia yang stabil, mengkonsolidasikan

perdamaian dan mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi fokus utama dari jalannya TICAD.

Sejak awal dibentuk, TICAD telah berlangsung sebanyak tujuh kali. Perubahan yang nyata terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tujuan forum yang awalnya dibuat untuk mendorong reformasi ekonomi dan politik di Afrika, berkembang menjadi kerjasama ekonomi khususnya bidang pengembangan infrastruktur dan investasi di berbagai bidang oleh pemerintah Jepang.

Solidaritas yang ingin dibangun Jepang lewat forum tersebut terbukti berhasil. Forum tersebut mampu membawa pihak-pihak lain sadar bahwa dunia ini terikat tanggung jawab global antar bangsa. Kepedulian tidak terbatas pada status negara saja, karena kemanusiaan merupakan sesuatu yang universal. Argumen tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa partisipan yang menghadiri forum ini pun semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah Jepang, perwakilan negara-negara Afrika dan beberapa organisasi internasional, saat ini *United Nations* (UN), *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, dan bahkan dari kalangan akademisi pun turut mengambil peran dalam forum kerjasama Jepang dan Kenya.

Hasil dari forum ini pun semakin nyata, dimana dapat dilihat bahwa TICAD berhasil menghasilkan beberapa perjanjian bisnis dan *blue-print* pembangunan Afrika di masa mendatang. Jangkauan pembahasan yang awalnya hanya menyangkut reformasi di bidang politik dan ekonomi juga meluas hingga pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan inovasi teknologi menjadi fokus kerjasama yang baru.

TICAD VI dilaksanakan pada 27-28 Agustus 2016 di Kenya, Afrika di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Pada tahun ini, TICAD VI mengangkat tema "*Advancing Africa's Sustainable Development Agenda: TICAD Partnership for Shared Prosperity*". Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memfokuskan pada transformasi ekonomi, sistem kesehatan dan kestabilan sosial, outcome dari TICAD VI berupa beberapa dokumen yakni *The Nairobi Declaration*, *The Nairobi Implementation Plan*, *The*



TICAD VI Business Declaration dan rencana program bernama "*A Call To Action*" (Fathirrahma, 2018). Selain sebagai tempat dilaksanakannya TICAD VI, Kenya memiliki posisi istimewa dalam kerjasama Jepang dan Afrika. Kenya merupakan penerima ODA Jepang terbesar di Afrika dan merupakan tuan rumah bagi beberapa proyek bantuan regional.

Lewat pemaparan tersebut, Jepang mengimplementasikan universalisme etis lewat kebijakan luar negerinya dalam ODA dan forum internasional TICAD. Selain itu, penulis melihat bagaimana kebijakan luar negeri Jepang yang diimplementasikan ke Kenya senantiasa menjunjung kepentingan individu sesuai dengan pandangan kosmopolitanisme. Hal ini dicerminkan lewat bantuan ODA yang juga berbentuk bantuan teknis.

Dengan demikian, penulis dapat berargumen bahwa jenis ODA Jepang ke Kenya juga dapat dikategorikan sebagai komitmen *thick cosmopolitanism*. Hal ini didasari atas fakta bahwa Jepang tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk hibah pinjaman, namun juga proyek-proyek pembangunan yang mampu mengubah kondisi masyarakat Kenya secara jangka panjang.

Contoh yang menjadi bukti argumen di atas adalah dibangunnya model *kitchen garden* di Kenya oleh Jepang, bekerja sama dengan *Scaling up Nutrition Civil Society Alliance* (SUN CSA Kenya), pada tahun 2020. Model kebun ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Kenya yang masih mengalami kelangkaan sumber pangan seperti buah dan sayur sehingga harganya mahal dan sulit dijangkau (KNA1). Langkah lebih lanjut dari proyek ini adalah pelatihan bagi pemuda dan perempuan di sekitar proyek tentang metode pertanian terbaru yang diinisiasi oleh JICA.

Selanjutnya, kosmopolitanisme juga menjunjung tinggi individu sebagai tujuan hubungan internasional. Hal ini juga dapat kita lihat dalam kebijakan ODA Jepang ke Kenya. Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, memvalidasi bahwa Jepang memang memiliki perspektif yang unik terkait konsep pembangunan dan pengentasan kemiskinan (MOFA, 2013).

Jepang menilai, pembangunan suatu negara akan terwujud bukan semata-mata hanya karena sumber daya alam. Sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Sumber daya manusia disini mengacu pada pendidikan dan skill yang dimiliki individu di negara tersebut. Untuk itu, bantuan teknis Jepang selalu berorientasi pada *human resource development*.

Contoh lain yang mampu menguatkan argumen bahwa Jepang menjunjung tinggi kepentingan individu di Kenya, sesuai dengan kosmopolitanisme, dapat dilihat lewat program *In-Service Training System* (INSET). Kenya berkomitmen untuk menjadi negara industrialisasi di tahun 2030. Namun, hingga saat ini, masih banyak masyarakat Kenya yang kekurangan akses ke pendidikan sains dan matematika dasar.

INSET dibuat dengan target para guru sains dan matematika di sekolah dasar serta menengah di Kenya. Program INSET terdiri dari pemantapan sistem dengan training para guru, bekerja sama dengan tenaga ahli dari SMASE-WECSA. SMASE-WECSA merupakan program dibawah *Centre for Mathematics, Science, and Technology Education in Africa* yang mengakomodasi pelatihan internasional di 34 negara benua Afrika. INSET juga menargetkan pemantapan staff administrasi yang dapat mendukung proses belajar sains dan matematika.

Lewat program ini, Jepang menginisiasi pelatihan dan kursus bagi para tenaga ajar di Kenya demi mencapai goals di tahun 2030 sebagai negara industrialisasi. Tujuan tersebut dapat dicapai jika individu Kenya memiliki kapabilitas dalam bidang Matematika dan Sains. INSET merupakan upaya untuk mencapai kapabilitas standar individu tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri Jepang ke Kenya dalam bentuk ODA merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep *human security*. Hal ini dibuktikan dengan bantuan Jepang yang mengakomodasi berbagai sektor yang berhubungan dengan keamanan seperti pertanian, pembangunan infrastruktur, proyek pelatihan, dan pengembangan manajemen ekonomi. Bantuan-

bantuan tersebut telah memenuhi beberapa aspek *human security* yaitu *food security*, *health security*, *environment security*, dan *economy security*.

Sementara itu, dilihat dalam analisis kosmopolitanisme, bantuan Jepang ke Kenya merupakan implementasi atas gagasan universalisme etis dimana Jepang bukanlah negara individualis yang tidak peduli pada perkembangan negara lain. Sebaliknya, Jepang membuktikan bahwa norma kemanusiaan yang tertuang dalam bantuan-bantuannya ke Kenya mampu melampaui batas kedaulatan.

Jepang juga telah mengimplementasikan *thick cosmopolitanism* dalam bantuannya terhadap Kenya. Hal ini didorong oleh perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang menjadi pasifisme yang membuat Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional, juga didorong pula oleh kepercayaan tradisional Jepang yang mengedepankan nilai kemanusiaan, yakni nilai Bushido.

Terakhir, pandangan kosmopolitan yang percaya bahwa tujuan utama hubungan internasional adalah individu juga tercermin lewat bantuan Jepang. Bantuan teknis Jepang yang berbasis *human resource development* menargetkan individu sebagai tujuan keberhasilannya. Contohnya dapat kita lihat di dalam INSET yang menargetkan peningkatan kapabilitas matematika dan sains di Kenya demi mencapai *goals industrialized country* di tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baba, Gurol & Gonen, Hakan. (2016). "Japan's Agenda Setting On Human Security: Discourses and Practices As Positive-Sum Gain At The Regional Context". *Journal of Administrative Sciences*. Vol. 14, No. 28.
- Embassy of Republic Kenya in Japan. "History of Diplomatic Relations". <http://www.kenyarep-jp.com/en/relations/history/>.
- Fathirrahma, Naufalita. (2018). "Tokyo International Conference on African Development (TICAD) Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri Jepang". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hanavia, Helfials Farma. (2019). "Motif Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Kenya melalui Japan Official Development Assistance". Universitas Andalas. Padang, Sumatera Barat.
- JCIE. (2015). "Global Health Press Tour to Kenya". <https://www.jcie.org/programs/global-health-and-human-security/globalhealth-press-tour/kenya/>.
- JICA Japan. "Kenya: Mombasa International Airport Development Project". <https://www.jica.go.jp>
- JICA Japan. "Activities in Kenya: Human Resource Development". <https://www.jica.go.jp/kenya/english/activities/activitiy01.html#a03>.
- JICA. (2022). "Signing of Grant Agreement with Kenya: Contributing to Improve the Investment Environment fo the Special Economic Zone in Mombasa, A Gateway to East Africa". [https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20220621\\_21\\_en.html](https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20220621_21_en.html).
- Kivisi, Felister Saliku. (2019). "Japan-Kenya Relationship, The Human Security Concept and Kenya's Big Four Agenda". *American Journal of Public Policy and Administration*. Vol. 4, No. 1.
- KNA1. "Sack Farming Technique As Elixir For Food Security". <https://www.kenyanews.go.ke/sack-farming-technique-as-elixir-for-food-security/>.
- Kumssa, Asfaw & Kiriti-Nganga, Tabitha W. (2016). "Human Security Assessment in Kenya, The Case of Isiolo, Likipia, Nandi, and Elgeyo Marakwet Counties". *Review of European Studies*. Vol.8, No.3.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). "Japan is Committed to African's Development. [https://www.mofa.go.jp/policy/culture/page24e\\_000002.html](https://www.mofa.go.jp/policy/culture/page24e_000002.html).

- Nautilus Institute. "What is Article 9 of the Constitution of Japan?". <https://nautilus.org/>.
- National Irrigation Authority. "Mwea Irrigation Project: Background Information". <https://www.irrigation.go.ke/projects/mwea-irrigation-scheme/>.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. "HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE". <https://www.unocha.org/>.
- Potter, David M. (2009). "Evolution of Japan's Postwar Foreign Policy". Dalam Laura Rubio Diaz Leal, ed. *China and Japan: Economic Modernization, Changes Politicians and World Positioning*. Mexico City: Editorial Castillo.
- Rosyidin, Mohammad. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non Barat*, Depok: Rajawali Pers.
- UNDP. (2022). "Japan Funds Forest and Land Restoration Action to Combat Climate Change in Kenya". <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/japan-funds-forest-and-land-restoration-actions-combat-climate-change-kenya>.